

BAB II

Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi di Kalimantan Timur

2.1 Deforestasi Kawasan Hutan di Kalimantan Timur

Deforestasi merupakan situasi hilangnya tutupan hutan yang mengakibatkan hutan kehilangan struktur dan fungsinya.¹ Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi areal tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.² Tercatat pada tahun 2000-2015 kawasan hutan Kaltim mengalami deforestasi rata-rata sekitar 36.000 ha per tahun. Rata-rata degradasi di kawasan hutan sebanyak 56% terjadi di Hutan Produksi Terbatas yang belum berijin, penyebab utama dari degradasi yang terjadi adalah akibat pembalakan, baik legal maupun ilegal.³

Forest Watch Indonesia mengungkapkan Provinsi Kaltim memiliki ancaman nyata kehilangan hutannya. Tercatat pada tahun 2013 Kaltim memiliki 6,3 juta hektar

¹ _____, *Deforestasi Tanpa Henti Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*, Forest Watch Indonesia, diakses dalam http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf (15/03/2018, 19:05 WIB).

² _____, *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degraasi Hutan (REDD)*, diakses dalam https://www.elaw.org/system/files/REDD_PERMENHUT_P-30-2009_BILINGUAL.pdf (15/03/2018, 19:10 WIB).

³ _____, *Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, Dewan Nasional Perubahan Iklim diakses dalam <https://anzdoc.com/queue/strategi-pembangunan-kalimantan-timur-yang-berkelanjutan-dan.html> (15/03/2018, 20:00 WIB).

hutan alam namun pada 2016 hanya tersisa 5,89 hektar. Adapun penyebab deforestasi dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifatnya, yakni penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung dari deforestasi adalah aktivitas yang berdampak langsung dalam perubahan tutupan hutan seperti kegiatan pembukaan hutan dan pemanenan kayu hutan alam, sedangkan penyebab tidak langsung dari deforestasi adalah kekuatan nasional atau daerah yang dapat mendorong terjadinya kehilangan hutan.⁴

Deforestasi yang terjadi merupakan kegiatan dari manusia, penguasaan lahan di Provinsi Kaltim sangat berdampak pada laju deforestasi di Kaltim, seperti keberadaan industri ekstraktif pertambangan dan penggalian, Kaltim memberikan izin konsesi terluas, mencapai 8,6 juta hektar atau 7 persen dari luas daratan Provinsi Kaltim sendiri. Penguasaan hutan di Kaltim dikuasi oleh berbagai sektor penguasaan, yaitu Hutan Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.⁵

Aktivitas dan kegiatan ekonomi disekitar hutan menimbulkan deforestasi dan mengancam hilangnya hutan yang ada di Kaltim, seperti pembangunan hutan tanaman industri yang mengorbankan hutan, ekspansi perkebunan kelapa sawit bahkan menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan laju deforestasi di Kaltim. Deforestasi yang terjadi di area HPH memperlihatkan pemanfaatan hutan HPH belum menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, lemahnya pengawasan

⁴ _____. *Deforestasi Tanpa Henti Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*, Op. Cit, hal 11.

⁵ *Ibid.*, hal. 16 et Seqq.

terhadap area-area bekas penebangan untuk kembali dilakukan penanaman juga menjadi sebuah kendala besar.⁶

Kalimantan Timur merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia, Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa kawasan hutan yang luas dengan hasil hutannya, serta kandungan tambang seperti batubara, mineral, gas dan minyak bumi yang melimpah. Kaltim memiliki wilayah daratan 127.267,52 km² dengan wilayah pengelolaan laut seluas 25.656 km² dengan penduduk berjumlah sebanyak 3.300.517 jiwa.⁷ Kaltim memiliki luas wilayah yang besar dan memiliki potensi besar terhadap SDA, namun dengan ketergantungan Kaltim terhadap SDA semakin meningkatkan eksploitasi SDA terutama pada sektor kehutanan dan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan terus meningkat. Peningkatan deforestasi dan degradasi hutan juga meningkat dengan laju percepatan mencapai 350.000 ha pertahun, hal ini mengakibatkan lahan kritis di Kaltim mencapai 6.402.472 ha dengan faktor kebakaran hutan, pembalakan, serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya.⁸

Kerusakan hutan tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan namun juga memberikan dampak negatif terhadap kelompok masyarakat yang tinggal dikawasan hutan yakni masyarakat lokal yang bermukim didalam atau disekitar kawasan hutan. Kerusakan lingkungan menyebabkan berubahnya nilai sosial

⁶*Ibid.*, hal.37

⁷_____, *Profil Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, diakses dalam <http://www.bappedakaltim.com/profil-daerah-provinsi-kalimantan-timur> (15/04/ 2018, 19:00 WIB)

⁸_____, *Kaltim Hijau Tahun 2013*, Dewan Kehutanan Daerah Kalimantan Timur, diakses dalam <https://anzdoc.com/kaltim-hijau-tahun-2013.html> (15/03/2018, 19:08 WIB)

masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, tidak hanya secara sosial namun juga dari segi nilai ekonomi.

Kerusakan hutan dipicu akibat kegiatan HPH atau Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) atau HPH skala kecil, aktivitas HPH menyebabkan berkurangnya hasil hutan bagi masyarakat sekitar maupun didalam kawasan hutan, hal ini disebabkan karena timbulnya daerah-daerah hutan terbuka, dan bisingnya suara mesin dan orang-orang yang bekerja sehingga mengusir satwa tangkapan masyarakat disekitar hutan.⁹

Aktivitas oleh perusahaan HPH maupun HPHH menyebabkan terjadinya perubahan baik secara lingkungan maupun sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Perubahan ini dipicu akibat perkembangan sosial ekonomi yang terjadi dikawasan hutan, masyarakat adat atau *indigenous peoples* di kawasan hutan cenderung berubah, yang semula tidak mengenal transaksi ekonomi kemudian menjadi masyarakat yang menekan pada keuntungan ekonomi semata, seperti yang terjadi pada masyarakat adat dayak di Kaltim yang bermukim di sekitar kawasan hutan, mereka mengalami perubahan dalam cara berladang.¹⁰

Masyarakat adat cenderung mengelola hutan secara berkelanjutan, dimana hutan dikelola berdasarkan kepercayaan dari nenek moyang mereka terdahulu yakni dengan dibumbui oleh adat, mitos dan ritual yang kuat. Masyarakat adat biasanya

⁹ Johan Iskandar dan Azhar Ginanjar, *Perubahan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Dayak Akibat Kegiatan HPH/HPPHH di Kutai Barat Kalimantan Timur*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol, 4, No. 3, Bandung, hal.8 diakses dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5268> (20/05/2018, 16:00 WIB)

¹⁰ *Ibid.*, hal. 11.

berladang dengan memerhatikan aspek biotik seperti flora dan fauna serta aspek abiotik dengan memerhatikan jenis tanah, kesuburan tanah dan pergantian musim secara mendalam yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Masyarakat adat kemudian mulai meninggalkan cara lama tersebut dalam melakukan aktivitas berladang mereka, mereka cenderung berladang atas dasar aspek ekonomi saja yang mengejar pada keuntungan atas nilai tukar.¹¹

Aktivitas ekonomi dikawasan hutan memiliki nilai tinggi, seperti produksi kayu, pertambangan dan penggalian dilakukan, hutan dieksploitasi atas dasar kesejahteraan masyarakat namun ternyata juga mengakibatkan kerusakan yang berdampak buruk bagi masyarakat pula, kurangnya kontrol dari pemerintah menyebabkan hutan beralih fungsinya. Pada tahun 1969 sampai 1974, kurang lebih 11 juta hektar konsesi hutan diberikan di wilayah Kaltim hal ini menjadikan Indonesia sebagai produsen kayu hutan tropis terbesar di dunia pada saat itu, Indonesia memberikan kontribusi sebesar 41% di pasar global sehingga pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami kenaikan hingga mencapai 7,42 % per tahun, kemudian di awal tahun 1970 sampai tahun 1991 gas dan minyak bumi ditemukan dalam skala besar yang mana kemudian migas menjadi sumber utama perekonomian Kaltim pada saat itu.¹²

¹¹ *Ibid.*, hal. 5

¹² Rusma Wongso, *Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur, Dinamika dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Rakyat*. Samarinda, hal.3 diakes dalam http://untag-smd.ac.id/files/ORASI_ILMIAH_SEKDA_WISUDA_2017.pdf (17/05/2018, 18:30 WIB)

Pada 1980-an pelarangan ekspor kayu *log* diberlakukan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian hingga menyebabkan industri *plywood* berkembang pesat di Kaltim, namun hal ini menyebabkan semakin maraknya *illegal logging* dikarenakan ketidakmampuan penyediaan bahan baku dan lemahnya pengawasan hingga di pertengahan 1990-an industri kehutanaan mulai mengalami kemunduran, kemudian pada periode 1990-2009 kayu tidak lagi menjadi penopang perekonomian Kaltim namun berpindah ke pertambangan migas dan industri pengilangan minyak bumi serta gas alam cair, pada fase ini pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya yakni hanya mencapai maksimal pada angka 5,71% saja per tahun.¹³

Tahun 2007 sektor pertambangan batubara menjadi penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada tahun 2010, pada tahun 2010 sampai 2016 industri migas dan pertambangan migas kemudian mengikuti, sejak 2010 sampai 2016 sektor pertambangan secara terus-menerus menjadi penyumbang terbesar PDRB Kaltim. Pada tahun 2010 pertambangan batubara memberikan kontribusi sebesar 27,88% dan pada 2016 meningkat menjadi 31,03%, namun di lain sisi pertambangan migas mengalami penurunan, pada tahun 2010 pertambangan migas memiliki kontribusi 17,29% lalu pada tahun 2016 menjadi 12,73% saja.¹⁴

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, hal.4.

Kaltim memiliki cadangan batubara nasional sebesar 28% namun tingkat produksinya mencapai 56,3% produksi nasional, umur batubara Kaltim diprediksi akan ada sekitar 37 tahun lagi dengan tingkat kapasitas produksi tetap sebesar 236 juta ton/tahun.¹⁵ Pertambangan dan penggalian merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusi pada PDRB Kaltim. Pada tahun 2016 sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 43,34% dari nilai PDRB, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 45,16%, hal ini disebabkan pada penurunan yang disebabkan rendahnya permintaan dan rendahnya harga jual batubara dan migas pada tahun 2016. Tercatat pada tahun 2013 sektor pertumbuhan pada petambangan dan penggalian melambat dari 1,85% menjadi -0,40% pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali -4,89% di tahun 2015, sedangkan pada 2016 sedikit membaik yaitu -3,52%.¹⁶

Pada kenyataannya tingkat pertumbuhan ekonomi disektor hutan, tambang dan penggalian berperan besar pada pertumbuhan Kaltim, dampak nyata dari pengelolaan SDA diwilayah kaltim sudah mulai dirasakan, pemerintah tidak bisa terus menerus bergantung terhadap SDA sebagai sektor utama perekonomiannya, dengan aktivitas ekonomi menggunakan SDA yang tidak terbarukan akan terus mengakibatkan terganggunya ekosistem lingkungan. Kerusakan lingkungan dalam satu dasawarsa terakhir telah memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁶ _____, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2016* diakses dalam <http://www.bappedakaltim.com/storage/file/sMcfze67zotDB4dL.pdf> (17/08/2018, 15:15 WIB).

Kaltim menyadari bahwa dalam perekonomiannya tidak bisa terus-menerus menggunakan SDA yang tidak terbarukan yang mana pada sepuluh tahun terakhir mendominasi kontribusi dalam perekonomian Kaltim.¹⁷ Kerusakan lingkungan tidak hanya berpengaruh pada sosial namun juga aktivitas ekonomi, begitupun aktivitas ekonomi yang berlebih akan memberikan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun sosial.

2.2 Inisiatif *Heart of Borneo*

2.2.1 Awal Terbentuknya Inisiatif *Heart of Borneo*

Kawasan *Heart of Borneo* (HoB) atau Jantung Borneo merupakan suatu kawasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan atau Borneo yang mencakup sebagian wilayah Brunei Darussalam. Pembentukan Inisiatif HoB merupakan sebuah kerjasama yang dibangun antar negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam mengelola kawasan HoB berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.¹⁸ HoB memiliki tujuh fungsi penting yakni berfungsi sebagai tutupan kawasan hutan, sebagai tempat pelestarian

¹⁷ Jauchar B, *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Propinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan)*, Borneo Administartor, Vol, 8, No, 1, 2012, Samarinda, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52343-ID-otonomi-daerah-dan-pengelolaan-sumber-da.pdf> (20/05/2018, 16:00).

¹⁸ _____, *National Strategic Plan of Action, Bridging Conservation and Sustainable Developmet in Three Countries*. Heart of Borneo National Working Group, 2009, *Op. Cit.*, hal. 8 *et Seq*

keanekaragaman hayati, sebagai menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, pelestarian nilai sosial budaya, dan kawasan ekowisata.¹⁹

Inisiatif HoB diawali pada pertemuan pertama tiga negara di Brunei Darussalam pada 05-06 April 2005 dengan tema “*Three Countries-One Conservation Vision*”, dimana dalam pertemuan inilah kemudian menghasilkan kesepakatan antar tiga negara untuk membentuk deklarasi Inisiatif HoB yang sebelumnya telah dilakukan pertemuan tingkat Provinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur). Pada pertemuan tingkat Provinsi ini, adapun kesepakatan yang dihasilkan yakni kesepakatan mengenai konsep area HoB, kesepakatan, melaksanakan lokakarya tingkat nasional, regional dan internasional, sosialisasi HoB keseluruhan pemangku kepentingan terkait serta mendorong formalisasi Inisiatif HoB melalui deklarasi. Pada tanggal 06-08 Desember 2005 lokakarya tingkat nasional diselenggarakan di Jakarta dan menghasilkan *draft* Deklarasi Inisiatif HoB.²⁰

Inisiatif HoB kemudian dipresentasikan oleh Menteri Kehutanan dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 14 Maret 2006 yang mana pada saat itu disepakati Inisiatif HoB hanya dapat diluncurkan atau belum dapat dideklarasikan. Inisiatif HoB kemudian diluncurkan pada pelaksanaan *side event* pada pertemuan *Conference of the Parties (COP8)-Convention on Biological Diversity (CBD)* di Brasil pada 27 Maret 2016 dengan

¹⁹ _____, *Gubernur Kaltim: “Heart of Borneo” Harus Dipertahankan*, 2011
<http://www.tourismmonitor.com/2011/09/gubernur-kaltim-heart-of-borneo-harus.html#.V09xL6KmR7k> (15/03/2018, 19:10 WIB)

²⁰ _____, *Sejarah HoB, Op.Cit.*,

ditandai pernyataan oleh perwakilan masing-masing negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pertemuan berlanjut pada 24 November 2006 di Cebu, Filipina dalam rangka pertemuan *Senior Official Meeting (SOM) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Phillipines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA)*, yang menghasilkan kesepakatan deklarasi HoB pada acara BIMP-EAGA dan melakukan penyempurnaan naskah deklarasi HoB, serta membahas pertemuan trilateral lanjutan pada 4 Desember 2006 di Jakarta.

Pada tanggal 12 Februari 2007 deklarasi Inisiatif HoB ditandatangani secara langsung oleh perwakilan masing-masing negara, penandatanganan deklarasi Inisiatif HoB ini dilaksanakan di Nusa Dua, Bali oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, *Minister of Natural Resources and Environment*, Malaysia, dan *Minister of Industry and Primary Resources*, Brunei Darussalam. Deklarasi ini menandakan ketiga negara sepakat untuk bersama-sama secara sukarela dalam mengelola HoB dengan prinsip konservasi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi peraturan perundangan di negara masing-masing anggota.²¹

Pengelolaan HoB memiliki prinsip terhadap keberlanjutan sistem penyangga kehidupan, dalam pengelolaannya HoB memerhatikan pada fungsi-fungsi sosial budaya, ekonomi dan ekologi, serta memerhatikan pada pola kerjasama antar negara dan daerah di kawasan HoB. Wilayah HoB memiliki pola sebaran kawasan konservasi di kawasan dataran tinggi dan perbatasan negara yang berada di pulau

²¹ _____, *National Strategic Plan of Action, Bridging Conservation and Sustainable Development in Three Countries*. Heart of Borneo National Working Group, 2009, *Op. Cit.*, hal. 8 *et Seq*

Kalimantan, wilayah HoB ini memperhatikan pada batasan-batasan baik dari aspek hidrologi, kawasan habitat penting satwa, kawasan tutupan hutan, maupun status kawasan hutan seperti kawasan taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, dan kawasan hutan produksi.

Berdasarkan prinsip dan kriteria diatas, distribusi area HoB di tiga negara, meliputi Indonesia (56,54%), Malaysia (41,87%), dan Brunei Darussalam (1,59%). Sedangkan untuk wilayah Indonesia, cakupan wilayah HoB mencakup 10 Kabupaten di tiga Provinsi di Kalimantan, yaitu: Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kabupaten Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan, Provinsi Kalimantan Barat mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, dan Sintang serta Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Kabupaten Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Murung Raya.²²

Luas wilayah HoB di Indonesia mencakup sekitar 16,8 juta ha.²³ Wilayah HoB secara administratif berada di bawah tiga Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur namun kemudian beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran wilayah dan membentuk Provinsi baru yakni Kalimantan Utara sehingga secara administratif wilayah HoB meliputi empat provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.²⁴

²² *Ibid.*, hal. 12 *et Seq*

²³ _____, *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 2015-2019*, Kelompok Kerja Nasional *Heart of Borneo* (HoB), 2014, hal. 5.

²⁴ *Ibid.*, hal.10

Mayoritas masyarakat lokal di cakupan wilayah HoB berasal dari suku Dayak, ada juga yang berasal dari suku Jawa yang berasal karena proses imigrasi serta kelompok masyarakat lain yakni Melayu serta Cina. Wilayah HoB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dengan 3.000 jenis pohon, 200 spesies anggrek, dan ada 1.000 spesies pakis, selain memiliki kekayaan berupa tumbuhan wilayah HoB juga merupakan habitat satwa liar yang terhitung diantaranya 222 mamalia, 358 spesies burung, mamalia air tawar, 32 spesies ular, 27 spesies kadal, 2 spesies biawak, 7 spesies kura-kura air tawar, 2 spesies penyu dan buaya, 148 spesies amphibi dan 3 spesies Orang Utan yang terancam punah kehidupannya, cakupan wilayah HoB selain menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan cakupan wilayah HoB juga menghubungkan empat kawasan lindung yang memiliki luas 4,465 juta ha yakni Buka-Bukit Raya *National Park*, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentanum dan Taman Nasional Kayan Mentarang²⁵

Wilayah kawasan HoB memiliki sumber daya alam yang memiliki nilai yang tinggi mulai dari sumber daya hasil tambang emas dan batubara, tercatat 486 perusahaan pertambangan yang terdaftar untuk beroperasi di wilayah HoB dengan luas konsesi 2,05 juta ha, adapun perkebunan yang dikembangkan yakni kelapa sawit, karet, kopi dan kakao, adapun hasil hutannya dengan hutan produksi seluas 9,08 ha, konsensi hutan / kayu yang terdaftar dan sedang beroperasi sekitar 79 unit.²⁶

²⁵ _____, *The Heart of Borneo a Sustainable Funding for The Heart of Borneo*, hal.11

²⁶ _____, *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 2015-2019*, Op. Cit., hal. 7

Hutan kawasan HoB memiliki keanekaragaman hayati termasuk flora dan fauna di dalamnya, dimana terdapat 40-50% jenis flora dan fauna yang hanya dapat ditemui di Borneo. Hutan kawasan HoB juga menjadi tempat tinggal sekitar 15.000 spesies tumbuhan *vascular*, yang jumlahnya 5-6% dari total jumlah diseluruh dunia. Area kawasan HoB juga merupakan “menara air” bagi seluruh pulau Borneo. Kawasan HoB memiliki sungai-sungai besar yang hulunya berada di kawasan dataran tinggi di area HoB, adapun beberapa sungai besar yang membentang di kawasan HoB yakni Sungai Kapuas, Katingan, Barito dan sungai Mahakam yang airnya berasal di kawasan dataran tinggi di area HoB.²⁷

2.3 Tujuan Inisiatif *Heart of Borneo*

2.3.1 Visi Misi Inisiatif *Heart of Borneo*

Inisiatif *Heart of Borneo* memiliki Visi Misi yang disepakati bersama pada pertemuan pertama di Bali tahun 2007 dengan visi “*Menjembatani konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tiga negara*”, namun misi ini merupakan penyesuaian dari negara Indonesia dengan melihat kondisi yang ada di Indonesia, adapun Misi Inisiatif HoB yang telah disepakati yakni :

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan tata guna lahan berkelanjutan dengan tata kelola sumber daya alam di luar dan di dalam jejaring kawasan lindung

²⁷ *Ibid.*, hal. 15 *et Seq*

- b. Memprioritaskan kawasan lindung yang berada di perbatasan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung yang efektif dalam mewujudkan konservasi terhadap keterkaitan sistem ekologi dan keanekaragaman hayati hutan
- c. Mengelola isu-isu terkait mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan
- d. Mengenali, mempromosikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan potensi keindahan alam dan potensi tempat yang memiliki nilai budaya tinggi di kawasan HoB dan
- e. Memastikan terlaksananya Inisiatif HoB yang efektif dan dapat terimplementasi dengan baik untuk kepentingan semua pihak, baik pihak swasta, publik dan masyarakat lokal di kawasan HoB.²⁸

2.3.2 Program Inisiatif *Heart of Borneo*

Inisiatif HoB merupakan alat kerjasama regional Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dimana ada peran nyata yang proporsional serta pembagian tanggung jawab antara ketiga negara tersebut. Inisiatif HoB dalam kerangka kerjanya memiliki program dan membentuk kerangka kerja sub-regional. Indonesia sebagai bagian dari Inisiatif HoB memiliki beberapa isu-isu pokok dalam permasalahan lingkungan. Adapun isu-isu pokok terkait yakni permasalahan tata ruang, pengembangan investasi dalam pelaksanaan pembangunan di lingkup kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun hubungan trilateral hingga internasional, hal ini kemudian

²⁸ *Ibid.*, hal. 2

akan dapat diwujudkan dalam implementasi konservasi dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan program Inisiatif HoB yang telah disepakati ketiga negara.²⁹

Sejak pertama di cetuskan pada tahun 2007 Inisiatif HoB sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun dengan semangat *Three Countries One Conservation Vision* yang mana ketiga negara rutin mengadakan pertemuan trilateral tiap tahun yang diadakan secara bergiliran dimasing-masing negara anggota. Pada pertemuan trilateral kedua HoB, disepakati lima program yakni :

1. Pengelolaan Lintas Batas
2. Pengelolaan Kawasan Lindung
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
4. Pengembangan Ekowisata
5. Peningkatan Kapasitas Manusia

Program HoB yang telah disepakati oleh anggota Inisiatif HoB merupakan kerjasama yang mencakup permasalahan keamanan, ekonomi, sosial dan lingkungan.³⁰

2.4 National Strategic Plan of Action

Inisiatif HoB telah disepakati dan diumumkan oleh menteri dari tiga negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam pada pertemuan para menteri (*ministerial meeting*) yang diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 12 Februari

²⁹ *Ibid.*, hal.11.

³⁰ _____, *Strategi HoB, Op.Cit.*,

2007,³¹ dalam agendanya Inisiatif HoB mengadakan pertemuan rutin setiap tahunnya yang diselenggarakan di tiga negara secara bergantian, pada pertemuan tiga negara yang diadakan di Pontianak, pada tanggal 4-5 April 2008, adapun kesepakatan yang dihasilkan yakni dibentuknya dokumen *Strategic Plan of Action (SPoA) of Heart of Borneo* atau Rencana Aksi Strategis HoB, dokumen ini ditujukan untuk menjadi arahan bagi ketiga negara anggota untuk kemudian dikembangkan menjadi *National Strategic Plan of Action (NSPoA) of Heart of Borneo* atau Rencana Strategis dan Aksi Nasional HoB di masing-masing negara.³²

Inisiatif HoB dalam mencapai misinya membutuhkan program strategis, setiap negara dapat mengembangkan rencana masing-masing melalui program yang sesuai dengan misi yang disepakati bersama dalam dokumen *Strategic Plan of Action (SpOa)*. Perencanaan NSPoA sendiri harus berdasarkan pada prinsip dari kelima pilar utama dalam SPoA, yakni (Pengelolaan lintas batas, pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pengembangan ekowisata, dan peningkatan kapasitas manusia).³³

Indonesia merumuskan dan menyepakati Rencana Strategis dan Aksi Nasional HoB pada Juli 2008, rumusan Rencana Strategis dan Aksi Nasional inilah yang kemudian menjadi kerangka kerja nasional untuk sektor provinsi, kabupaten serta bagi para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dan relevan di wilayah HoB di

³¹ _____, *Sejarah HoB, Op.Cit.*

³² *Ibid.*,

³³ _____, *Strategi HoB, Op.Cit.*

Indonesia.³⁴ Masa berlaku NSPoA periode pertama yakni lima tahun mulai tahun 2008-2014 lalu dilanjutkan pada NSPoA selanjutnya pada tahun 2015 hingga Desember 2019 guna menyusun rencana baru yang disesuaikan dengan kondisi terkini, dalam NSPoA ini peneliti akan melihat kerangka kerja nasional untuk sektor Provinsi di Kalimantan Timur khususnya untuk dapat menganalisis kegiatan kunci untuk mewujudkan misi HoB.

Adapun tujuan dan manfaat penulisan dokumen Rencana Strategis dan Aksi Nasional HoB ini adalah untuk menjadi pedoman dan arahan yang jelas untuk para pelaku pelaksana baik pelaku inti dan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam kegiatan konservasi dan pemanfaatan SDA yang bernilai tinggi yang berada di wilayah HoB di Indonesia, sedangkan manfaat penulisan dokumen Rencana Strategis dan Aksi Nasional HoB ini dimana didalamnya terdapat landasan penyesuaian di seluruh tingkatan pemerintahan di area HoB baik mengenai beberapa program-program pelaksanaan terhadap pengelolaan SDA, pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dokumen ini akan memberikan kemudahan dalam menetapkan program-program yang menjadi prioritas dan memberikan arahan yang jelas terkait penggunaan dalam pengelolaan HoB oleh Pemerintah Daerah.³⁵

Prinsip dan fungsi pokok kelembagaan HoB memiliki tingkat yakni pada lingkup trilateral, nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mana kemudian kegiatan dan pelaku kegiatan dalam menjalankan kelembagaan pengelolaan HoB

³⁴ _____, *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 2015-2019*, *Op.Cit.*, hal. 1

³⁵ *Ibid.*,

akan berbeda pada tiap levelnya, pada penelitian ini saya akan melihat kelembagaan pengelolaan HoB pada level Provinsi, yakni Kalimantan Timur.

Kehadiran Inisiatif HoB tidak menggantikan fungsi dan tugas lembaga atau organisasi yang telah ada sebelumnya, Inisiatif HoB bersifat *fleksibel* dengan menyesuaikan terhadap permasalahan yang nantinya akan berkembang. Dalam NSPoA kelembagaan pengelolaan HoB memiliki prinsip keberhasilan dalam memanfaatkan SDA seoptimal mungkin, fungsi Inisiatif HoB dibagi berdasarkan lingkup kabupaten, provinsi, nasional dan lingkup trilateral.

Adapun fungsi pokok dalam kelembagaan pengelolaan HoB dibentuk untuk melakukan evaluasi dan membuat kebijakan bersama dengan lembaga lain terkait dengan pengelolaan HoB, melakukan mediasi dan penyesuaian rencana pembangunan di kawasan area HoB serta melaksanakan pengelolaan HoB dengan melakukan evaluasi kinerja dan pengumpulan informasi terkait kemajuan pengelolaan HoB.³⁶

2.4.1 National Strategic Plan of Action 2009-2013

Pada *National Strategic Plan of Action* (NSPoA) pertama ini terdapat kerangka kerja sub-regional. Pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah HoB memberikan tanggung jawab Indonesia untuk membentuk kerjasama lintas sektoral dan peran aktif bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di wilayah cakupan area HoB.

³⁶ _____, *National Strategic Plan of Action, Bridging Conservation and Sustainable Development in Three Countries*, Op.Cit., hal.27.

Indonesia sebagai anggota dari inisiatif HoB berusaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan di dalam area HoB dan menyelesaikan isu-isu pokok terkait seperti permasalahan tata ruang, pengembangan investasi dalam pelaksanaan pembangunan di lingkup kabupaten, provinsi, nasional maupun hubungan trilateral hingga internasional, untuk itu permasalahan rencana tata ruang pulau Borneo kemudian menjadi rujukan yang perlu di acui oleh provinsi maupun kabupaten/kota di kawasan HoB. Pembangunan di HoB memerlukan bantuan dari masyarakat lokal yang berada pada wilayah cakupan area HoB yang secara langsung berinteraksi untuk menjaga kelangsungan SDA yang ada disana.³⁷

Pada NSPoA ini dapat dilihat awal mula perkembangan HoB serta pembagian cakupan area HoB dibagi sesuai dengan prinsip pengelolaan HoB, dalam NSPoA ini juga dapat dilihat rencana strategis untuk menjalankan tujuan HoB dengan menganalisis kondisi wilayah cakupan area HoB di tiga Provinsi, untuk itu dalam NSPoA ini terdapat rancangan intervensi strategis yang diharapkan dapat menjangkau para pelaku pembangunan diberbagai tingkatan, baik pada tingkatan pelaku pembuat kebijakan maupun pelaku pelaksana kebijakan.³⁸

Dokumen NSPoA merupakan acuan untuk melakukan rencana aksi dan strategi nasional yang mana rencana aksi dan strategi nasional ini nantinya harus sejalan dengan rencana aksi dan strategi ditingkat provinsi, kabupaten/kota di area

³⁷ *Ibid.*, hal. 11-12

³⁸ *Ibid.*, hal. 20-21

HoB. Terdapat empat program utama Rencana Aksi dan Strategi HoB ditingkat nasional yang kemudian diterjemahkan ke beberapa tema program, yakni :

1. Penggunaan lahan berkelanjutan dengan menetapkan batas area wilayah HoB didorong dengan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di area HoB.
2. Penyempurnaan kebijakan sektor dengan menyusun indikator dan kriteria untuk mengelola SDA secara berkelanjutan serta menyebarkannya agar dapat terintegrasi dalam kebijakan sektor
3. Pengembangan kapasitas lembaga dengan mulai menyusun kerangka pengelolaan SDA di area HoB atau membuat sebuah *Master Plan* yang didukung dengan pengembangan riset dasar serta memperkuat kerjasama antar lembaga riset dan juga turut mengembangkan dengan cara meningkatkan kepedulian, melibatkan pada proses kerjasama dan peningkatan pendidikan dalam pelaksanaan HoB
4. Pengelolaan kawasan lindung dengan cara meningkatkan status kawasan lindung maupun kawasan konservasi yang berada di area HoB, penguatan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi dengan membangun kebijakan pengembangan seperti membangun sistem, monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung, serta mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat dengan melibatkan peran

swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan kawasan lindung yang berada di area HoB.

5. Pengelolaan sumber daya alam di luar kawasan lindung dengan cara menyempurnakan kebijakan sektor melalui pemerataan manfaat SDA secara berkelanjutan. Melakukan monitoring dan evaluasi serta mendorong program rehabilitasi di kawasan HoB dengan turut mengembangkan penggunaan lahan secara berkelanjutan.
6. Penguatan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan dengan cara penyempurnaan pada kebijakan sektor dan juga pendanaan secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dengan menetapkan mekanisme hubungan kerja dan prioritas pekerjaan antara kelompok kerja nasional dan kelompok kerja daerah HoB, pendanaan yang dilakukan dapat melalui penggalangan dana kreatif.³⁹

Pada dokumen NSPoA ini distribusi area HoB dihitung sesuai kesepakatan kelompok kerja HoB Nasional (Pokjanas) dan Kelompok Kerja HoB Daerah. (Pokjada).⁴⁰ Pada NSPoA ini, distribusi area HoB (Tabel 1) mencakup 23.309,278 ha dengan wilayah Indonesia (56,47%), Malaysia (41,94%), dan Brunei Darussalam (1,59%), untuk wilayah Indonesia mencakup 10 kabupaten di tiga Provinsi Kalimantan, yakni :

1. Kalimantan Barat (Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sintang)

³⁹ *Ibid.*, hal. 22 *et Seqq*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 14

2. Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya)
3. Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Barat, Malinau, Nunukan)

Tabel 2.1 Distribusi Area HoB di Tiga Negara

NEGARA	LOKASI	LUAS	
		(HEKTAR)	(%)
Indonesia	Kalimantan Tengah	2.466.000	11,03
	Kalimantan Barat	4.021.380	17,99
	Kalimantan Timur	6.137.000	27,45
	Total Indonesia	12.624.380	56,47
Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	355,278	1,59
Malaysia	Sarawak	5.373.000	24,04
	Sabah	4,000,673	17,90
	Total Malaysia	9.373,673	41,94
	Total HoB	23.309.278	100,0

Sumber, Heart of Borneo National Working Group, 2009, National Strategic Plan of Action, Bridging Conservation and Sustainable Development in Three Countries

2.4.2 National Strategic Plan of Action 2015-2019

National Strategic Plan of Action (NSPoA) kedua diterbitkan pada tahun 2015, NSPoA ini diterbitkan berdasarkan atas keterpaduan antara berbagai sektor,

program Pemerintah Provinsi serta pemangku kepentingan yang terlibat di area kerja HoB. Pada perumusan Rencana Aksi Startegis Nasional ini merujuk pada panduan terhadap upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan secara berkelanjutan dengan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan konservasi dengan karagaman hayati di wilayah cakupan HoB.⁴¹

Pada NSPoA kedua ini terdapat kerangka kerja yang berisi rencana aksi startegis baru yang telah disesuaikan berdasarkan kondisi terkini dan prediksi di masa yang akan datang terhadap kawasan HoB. Tujuan dari dokumen NSPoA 2015-2019 ini adalah sebagai arahan yang jelas dan dapat memberikan pedoman kepada para pelaku yang terlibat di HoB, baik pelaku inti maupun para pemangku kepentingan di kawasan HoB Indonesia.⁴²

Kawasan HoB Indonesia mengalami perubahan dalam distribusi cakupan area HoB dari sebelumnya, sesuai dengan keputusan pertemuan HoB pada tahun 2009, kawasan HoB secara administratif terletak di empat provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, mengingat bahwa terjadi pemekaran dikawasan area HoB dengan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga luas wilayah HoB yang mencakup areal sekitar 16,8 ha, terbagi menjadi empat Provinsi dan tersebar di 17 Kabupaten dan 96 Kecamatan.

⁴¹ *Ibid.*, hal v

⁴² *Ibid.*, hal 1

Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan pada tanggal 16 November 2012 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.⁴³ Adapun luas wilayah HoB setelah terjadi pemekaran wilayah, yakni mencakup empat Provinsi (Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat) dengan areal sekitar 16,8 juta ha (Tabel 2)

Tabel 2.2 Distribusi Area HoB di Indonesia

PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HEKTAR)
		(HEKTAR)
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	3.088.025,81
	Melawi	432.305,69
	Sintang	1.372.187,48
Total Kalimantan Barat (%)		4.892.518,99 (29,1%)
Kalimantan Tengah	Barito Utara	42.873,04
	Gunung Mas	250.701,89
	Kapuas	127.376,81
	Katingan	530.489,83
	Murung Raya	2.038.698,14
	Seruyan	34.336,15
Total Kalimantan Tengah (%)		3.024.475,85 (18%)

⁴³ _____, *Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara*, diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39108> (18/08/2018, 14:40 WIB).

Kalimantan Timur	Berau	664.082,78
	Kutai Barat	70.307,16
	Kutai Kartanegara	711.317,67
	Kutai Timur	553.347,06
	Mahakam Ulu	1.722.253,99
Total Kalimantan Timur (%)		3.721.308,66 (22 %)
Kalimantan Utara	Bulungan	657.425,12
	Malinau	3.716.253,12
	Nunukan	823.397,70
Total Kalimantan Utara (%)		5.197.075,94 (30,9%)

Sumber, Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo (HoB). 2014. Rencana dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 2015-2019.

Pada NSPoA ini terdapat isu-isu penting yang dipertimbangkan oleh Kelompok Kerja Nasional HoB dan menjadi rencana strategis bagi masing-masing pemangku kepentingan untuk mewujudkan *goal* dari Inisiatif HoB, adapun isu penting yang perlu ditangani secara seksama dan ditindaklanjuti, yakni pada *cross-cutting issue* pada kegiatan pertanian, keanekaragaman hayati, kualitas ekosistem, energi berkelanjutan, konektivitas, kehendak politik, penegakan hukum, eksploitasi SDA, pendanaan, peningkatan SDM serta kesejahteraan masyarakat, perencanaan tata guna lahan dan pembangunan infrastruktur, kerjasama perbatasan, serta isu penting tambahan lainnya seperti pertumbuhan populasi, hak dan kepemilikan SDA,

kebakaran hutan, perdagangan dan bisnis, promosi daerah tujuan wisata serta promosi kebudayaan dan kearifan lokal.⁴⁴ Pada isu penting inilah peran dari pemangku kepentingan sangat dibutuhkan maka dari itu pada NSPoA ini pendekatan manajemen para pemangku kepentingan harus menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan yang dikelola dengan baik, intensif dan dimonitor secara ketat.

Kawasan HoB ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), untuk itu program yang akan dirancang disesuaikan untuk memenuhi tujuan dari KSN sendiri, namun juga tetap mengacu pada tema dan misi HoB, dengan menyesuaikan terhadap tujuan KSN program yang dirancang kemudian diintegrasikan menjadi lima tema/misi dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam lima program prioritas namun ada tambahan pada program 1 yang menjadi program dasar sebagai program persiapan yang nantinya dapat mengakselerasikan ke lima program HoB.⁴⁵

Program prioritas yang dikembangkan bertujuan untuk mengatasi isu terkini dan isu-isu pokok atau potensial yang terjadi di kawasan. Program NSPoA diberlakukan selama lima tahun, adapun program NSPoA yang ingin dicapai oleh Indonesia, yakni:

1. Persiapan untuk implementasi dan percepatan program di HoB bertujuan sebagai dasar yang kuat bagi pengembangan program dan kegiatan di HoB.
2. Membangun dan mengelola SDA di luar kawasan lindung secara lestari di kawasan HoB yang berada di wilayah Indonesia

⁴⁴ _____, *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 2015-2019*, Op. Cit., hal. 16 et Seqq.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 21

3. Mengelola dan meningkatkan efektivitas kawasan lindung dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dari para pemangku kepentingan yang terlibat di kawasan HoB
4. Membangun ekonomi secara berkelanjutan di wilayah lintas-batas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pengelolaan SDA secara lestari.
5. Mengembangkan ekowisata yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempromosikan tujuan wisata di kawasan HoB
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di kawasan HoB yang bertujuan untuk dapat mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di kawasan HoB serta dapat memperkuat pengelolaan terhadap kawasan lindung di kawasan HoB.⁴⁶

⁴⁶ _____, *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 2015-2019*, *Op. Cit.*, hal. 21 *et Seqq.*